

JURNAL HUKUM

**OPTIMALISASI PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
YOGYAKARTA DALAM PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK PELAKU
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**



Diajukan oleh :

MONICA RINDA ODELIA

N P M : 160512298

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2019

JURNAL HUKUM

OPTIMALISASI PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA DALAM PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH



Diajukan oleh :

MONICA RINDA ODELIA

N P M : 160512298
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Tanggal : 20 Januari 2020

Dosen Pembimbing,

Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum

**Mengetahui
Dekan,**



Dr. Y. Sani Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

OPTIMALISASI PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA DALAM PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Monica Rinda Odelia

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

email : monicarinda2@gmail.com

Abstract

Taxes are the one of the largest sources of revenue in the country which can help increase state revenues, sustain state spending, and also for the benefit of national development. With the tax, it will affect the balance between the government and the community. The government is obliged to provide infrastructure to support the needs of the community, while the community has the right to get good infrastructure by also having the obligation to contribute and fulfill its obligations through tax payments which will later also be used to manage existing facilities and infrastructure, because it is through taxes that various infrastructure facilities what is needed by the community to meet their individual needs can be available. Taxes are collected from the public as tax subject who meet the requirements as taxpayers. Taxation conditions require active participation by taxpayers in fulfilling tax obligations. One of the subjects of the biggest taxpayer driving revenue in the country is coming from Micro Small Medium Enterprises. The large number of Micro Small Medium Enterprises actors in this country can then help to encourage and increase state revenue and the government hopes that Micro Small Medium Enterprises can increase their awareness of tax payment fulfillment.

Keywords: Taxes, sources of revenue, taxpayers, Micro Small Medium Enterprises

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang membutuhkan pengeluaran yang sangat besar untuk keperluan pembangunan nasional di segala sektor bidang dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak menutup kemungkinan mendapatkan dorongan besar yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan Negara untuk keperluan menopang pengeluaran negara yang sangat besar dan dapat membantu meningkatkan pendapatan Negara. Sumber penerimaan terbesar yang sangat menonjol di Indonesia salah satunya berasal dari sektor pajak, yang didalamnya terbagi lagi menjadi dua jenis penerimaan yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dipungut dari masyarakat atau pihak yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak. Wajib pajak juga dapat dikatakan sebagai subyek atau pihak yang harus melunasi pajak

terutang ke kas negara.¹ Sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian wajib pajak adalah pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dampak dari pembayaran pajak oleh wajib pajak tersebut pemerintah dapat menggunakannya untuk peningkatan berbagai aspek layanan di semua sektor. Kondisi perpajakan menuntut keikutsertaan secara aktif oleh wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan tentunya membutuhkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu khususnya berasal dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM merupakan salah satu subyek pajak yang menjadi pendorong penyumbang penerimaan negara di bidang pajak. Jumlah UMKM di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Dengan semakin meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia, pemerintah berharap agar sektor UMKM dapat berkontribusi untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang pajak.²

Dalam mencapai target yang tinggi, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama berupaya untuk memaksimalkan pelaku usaha yang belum optimal dalam pembayaran pajak, yaitu pelaku

UMKM yang diharapkan dapat menjadi sasaran dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai dominasi paling besar di Indonesia, akan tetapi dengan banyaknya jumlah UMKM tersebut pemenuhan pajaknya masih belum maksimal. Hal tersebut mencerminkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak khususnya pelaku UMKM sangat rendah. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak pelaku UMKM disebabkan karena kurang pemahaman mengenai peraturan perpajakan, pelaku UMKM umumnya orang pribadi yang enggan untuk melaporkan penghasilannya.³

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah peran yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kota Yogyakarta dan untuk meningkatkan jumlah pelaku UMKM di Kota Yogyakarta yang terdata memiliki NPWP?;apa sajakah kendala yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM dan bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?.

2. METODE

Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif.

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber.

¹ Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Hukum Pajak Elementer*, edisi pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 215

² Febirizki Damayanty Prawagis-Zahroh Z.A-Yuniadi Mayowan, *Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*, hlm. 2, <https://media.neliti.com/media/publications/194092->

[ID-pengaruh-pemahaman-atas-mekanisme-pembay.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/194092-ID-pengaruh-pemahaman-atas-mekanisme-pembay.pdf),

³ Maulida Alfi Lofiana Sa'diya; Siti Ragil Handayani; Idris Effendy, 2016, "Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Untuk Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu", hlm. 3, <https://media.neliti.com/media/publications/194006-ID-analisis-penerapan-peraturan-pemerintah.pdf>

Metode analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terhadap bahan hukum primer dilakukan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, dan analisis hukum positif. Terhadap bahan hukum sekunder dilakukan analisis dengan mencari persamaan dan perbedaan yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer. Kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan dan dibandingkan untuk dicari ada tidaknya kesenjangan, persamaan, dan perbedaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tinjauan Umum Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta merupakan sebuah instansi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta adalah sebuah lembaga milik pemerintah yang bertugas mengawasi dan melayani masyarakat dalam hal perpajakan yang berada di Kota Yogyakarta.⁴

Berdasarkan dengan peningkatan kepatuhan pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta melaksanakan seluruh pelayanan kepada masyarakat dan langsung berhubungan dengan wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama memiliki tugas yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Terkait dengan eksistensi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, sejarah awal mula adanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yaitu berawal dari adanya Kantor Pajak di Indonesia yang sudah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Memasuki zaman pemerintahan Jepang, Kantor Pajak mengalami perubahan nama menjadi Kantor Penetapan Pajak yang bertahan sampai dengan kemerdekaan Indonesia, kemudian kembali mengalami perubahan nama menjadi Kantor Inspeksi Keuangan, kemudian terjadi perubahan nama kembali menjadi Kantor Inspeksi Pajak pada tahun 1960.

Kantor Pajak di Yogyakarta ada seiring dengan didirikannya Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta yang kemudian terjadi perubahan nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta yang bertahan sampai pada tahun 1986, namun karena terjadinya perkembangan banyaknya jumlah wajib pajak di Indonesia dari tahun ke tahun maka nama Kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta diubah kembali menjadi Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta sesuai dengan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak sejak tanggal 1 April 1986. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007, Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu dipecah menjadi 2 (dua) yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Terkait Sistem Administrasi

⁴ KPP Pratama Yogyakarta, *Deskripsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta*, <https://kpppratamayogyakarta.wordpress.com/2010/05/08/deskripsi-kantor-pelayanan-pajak-pratama-yogyakarta/>

⁵ Klikpajak, *Ketahui Sejarah, Tugas, Fungsi, dan Struktur KPP Pratama*, <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/ketahui-sejarah-tugas-fungsi-dan-struktur-kpp-pratama/>

Modern di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai pada Saat Mulai Operasi (SMO) tanggal 30 Oktober 2007, demikian juga dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang saat ini digunakan adalah bekas gedung Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu yang diresmikan pada tanggal 3 Agustus 1995.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta meliputi seluruh wilayah yaitu terdiri atas 14 (empat belas) Kecamatan dengan 45 (empat puluh lima) Kelurahan. Luas wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta adalah 32,50 km². Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu sebagai berikut:⁶

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, yang bertugas untuk melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, dan sebagainya
- 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi, yang bertugas untuk melakukan pengumpulan, pencarian, pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan
- 3) Seksi Pelayanan, yang bertugas untuk melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- 4) Seksi Penagihan, yang bertugas untuk melaksanakan urusan penatausahaan

piutang pajak, dan urusan piutang lainnya

- 5) Seksi Pemeriksaan, yang bertugas untuk melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya
 - 6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, bertugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak. Tugas lainnya adalah pembentukan basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi
 - 7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi, tugasnya adalah melakukan proses penyelesaian permohonan wajib pajak. Tugas lainnya adalah melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak dan usulan pengurangan PBB
 - 8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV, yang masing-masing memiliki tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam melakukan intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak.
- Terhadap tata kerja semua unit struktur organisasi dalam menjalankan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta memiliki fungsi sebagai berikut:⁷

⁶Klikpajak, *Ketahui Sejarah, Tugas, Fungsi, dan Struktur KPP Pratama*, <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/ketahui-sejarah-tugas-fungsi-dan-struktur-kpp-pratama/>

⁷Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, 2019, *Ketahui Sejarah, Tugas, Fungsi, dan Struktur KPP*

Pratama, Klik Pajak, PT Mid Solusi Nusantara, hlm. 1, <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/ketahui-sejarah-tugas-fungsi-dan-struktur-kpp-pratama/>

- 1) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, serta pendataan obyek dan subyek pajak
 - 2) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
 - 3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat, pemberitahuan dan penerimaan surat lainnya
 - 4) Penyuluhan dan pelayanan perpajakan
 - 5) Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak, pelaksanaan ekstensifikasi
 - 6) Pengurangan sanksi pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak, pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, pelaksanaan konsultasi perpajakan, pembetulan ketetapan pajak, dan pelaksanaan administrasi kantor
- b. Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM

Pada bagian ini diuraikan mengenai penanganan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta diterapkan kepada seluruh wajib pajak dari semua jenis golongan, namun karena wajib pajak yang berada di Kota Yogyakarta lebih banyak didominasi dari pelaku UMKM, maka dalam hal penerapan penanganan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dititik beratkan dan difokuskan kepada pelaku UMKM.

Terhadap UMKM tersebut dilakukan pendataan, yang terlebih dahulu UMKM harus mendaftarkan melalui Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, kemudian dari data tersebut otomatis langsung masuk ke dalam Sistem Informasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang dikelola oleh Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Dalam hal ini, pendataan terhadap UMKM tidak hanya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, tetapi pendataan UMKM juga dilakukan oleh Dinas

Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Pendataan UMKM Oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pengertian UMKM dibagi menjadi sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan dinas yang bertugas untuk menjalankan dan melaksanakan segala urusan Koperasi dan UKM yang merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dari pemerintah daerah yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah meliputi bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dalam rangka

mengembangkan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta.⁸

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi sebagai berikut:⁹

- 1) Penyusunan program kerja dinas
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah
- 3) Pelaksanaan kerja sama koperasi, usaha kecil, dan menengah
- 4) Pembinaan, perlindungan, pemasaran, dan pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah
- 5) Pelayanan umum bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- 6) Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- 7) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota
- 8) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah

Dalam menjalankan dan melaksanakan perannya, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta mengharapkan untuk bisa menjadi penopang dan pendorong perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga dapat meningkatkan asset maupun omzet usaha Koperasi dan UKM.¹⁰ Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki satu lembaga yaitu Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang bertugas untuk meningkatkan jumlah pelaku UMKM secara menyeluruh dan terintegrasi yang menyediakan jasa-jasa *non-financial* bagi

koperasi dan UMKM meliputi pembinaan, pelayanan, konsultasi, diklat, penyuluhan, dan pameran dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Optimalisasi Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Untuk Mengenakan Pajak Terhadap UMKM

Pajak dikatakan sebagai sumber penerimaan terbesar bagi negara karena dilihat dari karakteristik atau ciri-ciri pajak yaitu tidak ada tegan prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung, pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, bila lebih maka digunakan untuk *public investment*, dan pelaksanaannya dapat dipaksakan secara yuridis.¹¹

Dilihat dari fungsinya, pajak memiliki 2 fungsi utama, yaitu fungsi budgeter (keuangan) dan fungsi mengatur. Di dalam fungsi anggaran, pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintah.

Fungsi yang kedua yaitu fungsi mengatur dimana digunakan untuk mengarahkan dan mengatur masyarakat ke arah dan tujuan tertentu yang dikehendaki pemerintah. Fungsi mengatur inilah yang mempergunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar

⁸DISKOP UKM DIY, "Program Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun 2019", hlm. 1, <http://diskopumkm.jogjaprov.go.id/publik/progrm-kegiatan-dinas-koperasi-dan-ukm-diy-tahun-2019/>

⁹DISKOP UKM DIY, "Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah", hlm. 1,

<http://diskopumkm.jogjaprov.go.id/publik/profil/>

¹⁰DISKOP UKM DIY, hlm.1

¹¹Y. Sri Pudyatmoko, hlm. 4

sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintahan.

Dilihat dari sistem pemungutannya, pajak memiliki 3 sistem pemungutan yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*. Dalam hal ini Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *Official Assesment System*, yaitu dimana pemerintah diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dan bahwa setiap wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, sesuai dengan yang mumpuni sehingga akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan.

Self Assesment System yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. *With Holding System* yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke 3 (bukan fiscus dan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Secara umum terkait dengan peran yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta terhadap wajib pajak yang dimilikinya diberlakukan secara merata terhadap semua wajib pajak umum dari berbagai golongan, namun dikarenakan di wilayah Yogyakarta ini wajib pajak didominasi oleh pelaku UMKM, maka dari itu secara tidak langsung Kantor Pelayanan Pajak Pratama berfokus melaksanakan perannya terhadap pelaku UMKM.

Peran yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta terhadap UMKM yaitu sebagai berikut:

1) Sosialisasi

Cara yang dilakukan dalam pelaksanaan peran sosialisasi tersebut yaitu sebagai berikut:

a) Mengadakan pertemuan dengan asosiasi UMKM

b) Mengundang wajib pajak dengan jenis usaha tertentu

c) Mengundang UMKM di area tertentu

d) Melakukan pemasangan baliho dan pamflet

e) Melakukan kunjungan kerja ke wajib pajak

f) Mendatangi satu per satu pelaku UMKM

Terkait dalam pelaksanaan sosialisasi, diberlakukan kapasitas maksimal karena keterbatasan jumlah petugas pajak dan dilaksanakan dalam kurun waktu sekitar 4 kali dalam 1 bulan, dan juga tergantung bagaimana komunikasi dengan asosiasi, kelompok masyarakat UMKM, tergantung kebutuhan di lapangan, dan kemudian baru ditentukan jadwal pelaksanaannya.

Kapasitas maksimal merupakan kuota tertentu yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta untuk mengadakan kegiatan sosialisasi apabila terhadap jumlah kuota yang ditentukan tersebut sudah terpenuhi, maka kemudian baru akan diadakan sosialisasi.

2) *Door to door* (kunjungan langsung ke wajib pajak)

Yang dimaksud dengan *door to door* yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta melakukan kunjungan kerja ke pelaku UMKM yang meliputi adanya konsultasi dan pengawasan. *Door to door* sendiri dilakukan secara tematik yaitu sebagai contoh dengan melakukan kunjungan kerja ke satu jenis usaha tertentu.

Selain itu terdapat metode kanvasing atau penyisiran yaitu dengan melakukan kunjungan kerja ke satu wilayah yang memiliki banyak jenis usaha untuk dilakukan pengecekan apakah terhadap pelaku usaha yang bersangkutan sudah memiliki NPWP ataukah belum, apabila sudah memiliki maka dilanjutkan dengan pengecekan terkait pelaporannya sudah benar ataukah belum. Terkait dalam pelaksanaannya, kegiatan *door to door* tersebut dilakukan hampir setiap hari.

3) Pengawasan

Dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap data yang masuk ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

apakah sudah sesuai dengan yang dilaporkan oleh wajib pajak ataukah belum.

Apabila masih terdapat ketidaksesuaian maka kemudian ditindak lanjuti dengan adanya himbauan. Apabila terhadap himbauan tersebut masih tidak dihiraukan oleh wajib pajak, maka kemudian akan ditindak lanjuti dengan tindakan hukum berupa pemeriksaan.

4) Tindakan Penegakan Hukum

Tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yaitu berupa pemeriksaan dan penagihan. Terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak untuk mengetahui terdapat pelanggaran ataukah tidak. Apabila terdapat pelanggaran, akan ditindaklanjuti dengan penagihan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Awal dalam proses penegakan hukum ini dimulai dari upaya untuk mengingatkan warga negara yang telah memiliki kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak dengan penyampaian surat himbauan dan surat teguran. Kewajiban perpajakan dimulai dari pendaftaran NPWP, penghitungan jumlah pajak yang terutang, pembayaran pajak yang masih kurang dibayar, dan pelaporan pajak melalui surat pemberitahuan (SPT).

Adanya penyampaian surat himbauan dimaksudkan agar warga negara sadar dan ingat akan kewajiban perpajakannya untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak apabila telah memenuhi kewajiban subjektif dan memiliki obyek pajak. Tahap selanjutnya adalah pelaporan SPT khususnya SPT tahunan, apabila wajib pajak belum menyampaikan SPT maka akan dikenakan surat teguran untuk segera menyampaikan SPT. Terhadap wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi apabila wajib pajak yang bersangkutan menghiraukan adanya surat himbauan dan surat teguran tersebut.

Pengenaan sanksi administrasi dikarenakan wajib pajak melakukan pelanggaran. Apabila terhadap warga negara yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan memiliki obyek pajak tidak bersedia untuk

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, maka dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta akan menerbitkan NPWP secara jabatan disertai sanksi administrasi berupa denda, kenaikan, maupun bunga. Apabila telah berstatus sebagai wajib pajak tetapi tidak bersedia melaporkan SPT, maka terhadap wajib pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi berupa denda maupun bunga. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi adalah melalui Surat Tagihan Pajak (STP).

Tindakan selanjutnya yaitu berupa pemeriksaan. Pemeriksaan berujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan baik dalam hal pendaftaran, pembayaran pajak, maupun pelaporan pajak. Hasil akhir dari pemeriksaan ini dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak baik berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila masih terdapat kekurangan pembayaran pajak, Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) apabila jumlah pajak terutang sama dengan nilai pembayaran pajaknya, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) apabila jumlah pajak terutang lebih kecil daripada nilai pembayaran pajaknya.

Tindakan tertinggi selanjutnya yaitu dapat dikenakan kepada wajib pajak apabila wajib pajak yang bersangkutan melakukan pelanggaran tindak pidana perpajakan. Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dimulai dari proses pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, dan pemedanaan.

Terhadap tindakan penegakan hukum berupa penagihan, dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan hanya sebatas penerbitan SPT untuk pengenaan sanksi bunga. Sementara untuk penagihan aktif dilakukan mulai dari penerbitan surat teguran, surat paksa, surat sita,

dan adanya proses lelang atas harta kekayaan wajib pajak.¹²

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta memiliki peran khusus untuk meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP yaitu sebagai berikut:

- a) Bekerja sama dengan UMKM
- b) Bekerja sama dengan asosiasi UMKM
- c) Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pengurusan perijinan yang diwajibkan disertakan NPWP
- d) Bekerja sama dengan Bank

Adanya peran di atas yang sudah dijelaskan, dalam hal ini diperlukan adanya optimalisasi terkait dengan peran yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yaitu bertujuan sebagai suatu tindakan, proses, atau metode untuk membuat sesuatu hal dalam hal ini peran yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta menjadi lebih sempurna guna mencapai tujuan atau target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

Berkaitan dengan adanya problematika kepatuhan perpajakan oleh pelaku UMKM, pemerintah melakukan perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Di dalam peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mana dimuat pengaturan terkait dengan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan batasan bruto tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menegaskan bahwa terdapat perubahan

yang signifikan terkait dengan soal besarnya pengenaan tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) yang mengubah ketentuan lama sebesar 1% (satu persen) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pengenaan pajak tersebut berlaku juga terhadap pelaku UMKM karena dilihat dari kriteria batasan omzet yang diterima oleh pelaku UMKM dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8M dalam 1 tahun pajak.

- e. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Dalam Optimalisasi Pengenaan Pajak Terhadap UMKM dan Upaya Yang Sudah Dilakukan Dalam Mengoptimalkan Peningkatan Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM

Secara khusus kendala yang paling utama dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yaitu mengenai masalah adanya ketidak seimbangan rasio jumlah petugas pajak dengan wajib pajak dan UMKM masih sangat jauh. Selain itu juga kendala yang dipengaruhi akibat dari faktor pergerakan ekonomi yang sangat drastis.

Berkaitan dengan kendala yang berasal dari wajib pajak, secara khusus kendala yang ada tersebut dikarenakan dari tingkat pendidikan dan pemahaman UMKM yang masih kurang di bidang perpajakan untuk patuh membayar pajak meskipun tanpa mendapatkan hasil imbalan secara langsung. Kebanyakan dari pelaku UMKM mengharapkan apabila setelah membayar pajak, para pelaku UMKM berkeinginan untuk langsung mendapat imbalan secara langsung. Pada kenyataan sebenarnya pelaku UMKM memanfaatkan hasil dari pajak seperti jalan halus, BBM subsidi, sekolah subsidi, kesehatan, tetapi tingkat kesadaran pelaku UMKM akan hal itu masih sangat minim. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta memiliki tugas ekstra untuk memberikan penjelasan, pengertian terkait hak

¹² BAB IX BAGAIMANA PAJAK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA,

http://edukasi.pajak.go.id/images/buku_pt/Materi_Terbuka/BABIX.pdf

dan kewajiban apa yang dimiliki UMKM sebagai WNI yang baik dalam hal perpajakan.

Terkait untuk mengatasi kendala tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta mengatasinya dengan bekerja menggunakan inovasi cara kerja “*beyond*” yaitu satu kali menjalankan pekerjaan langsung mendapatkan target yang banyak. Sebagai contoh, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta melakukan suatu kunjungan kerja ke suatu wilayah yang di dalam wilayah tersebut ditemui banyak wajib pajak dengan berbagai macam jenis usaha, dan terhadap jenis usaha tersebut dilakukan pendataan dan juga sosialisasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan peran yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tersebut, dapat dikatakan masih belum optimal karena masih ditemui beberapa kendala. Kendala tersebut berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dan juga berasal dari wajib pajak.

Kendala yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yaitu terkait adanya ketidakseimbangan rasio jumlah petugas pajak dengan wajib pajak dan pelaku UMKM masih sangat jauh, sedangkan kendala yang berasal dari wajib pajak dikarenakan pengaruh dari sisi pelaku UMKM yang tingkat pemahaman di bidang perpajakan masih sangat kurang untuk patuh membayar pajak tanpa mendapatkan hasil imbalan secara langsung.

Terhadap kendala tersebut sudah dilakukan upaya untuk mengatasinya, tetapi terhadap upaya yang sudah dilakukan tersebut masih tetap belum bisa optimal karena masih belum dapat membuahkan hasil yang ditargetkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Target yang diharapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yaitu tercapainya suatu kepatuhan dan penerimaan.

Diharapkan agar seluruh wajib pajak patuh, lapor, membayar pajak sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan, dan kemudian pelaku UMKM sadar apabila membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi manfaat dari dibayarkannya pajak tersebut pelaku UMKM juga ikut menikmati hasil dari pajak tersebut.

Berdasarkan semua peran tersebut, dapat dilihat dari hasilnya yaitu kepatuhan pajak di Yogyakarta masih belum menggembirakan, penerimaan belum tercapai, maka dari itu peran tersebut dapat dikatakan belum optimal dan harus ditingkatkan kembali. Dapat dikatakan berhasil dan sesuai target apabila terhadap seluruh wajib pajak mendaftarkan diri, memiliki NPWP, melapor, dan membayar pajak dengan benar.

5. REFERENSI

Buku-buku:

Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Hukum Pajak Elementer*, edisi pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta

Y. Sri Pudyatmoko, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, edisi revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta

Jurnal/Majalah:

Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, 2019, *Ketahui Sejarah, Tugas, Fungsi, dan Struktur KPP Pratama, Klik Pajak, PT Mid Solusi Nusantara*

DISKOP UKM DIY, “Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah”

DISKOP UKM DIY, “Program Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun 2019”

Febirizki Damayanty Prawagis-Zahroh Z.A-Yuniadi Mayowan, *Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*

Klikpajak, *Ketahui Sejarah, Tugas, Fungsi, dan Struktur KPP Pratama*

KPP Pratama Yogyakarta, *Deskripsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta*

Intan Yuningtyas Anggraeni; Naili Farida; Saryadi, 2013, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu", *Diponegoro Journal Of Social And Politic*

KPP Pratama Yogyakarta, *Deskripsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta*

Maulida Alfi Lofiana Sa'diya; Siti Ragil Handayani; Idris Effendy, 2016, "Analisis Penerapan Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Untuk Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan